

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada masa pemerintahan Donald Trump, negara Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang bersifat restriktif terhadap perusahaan telekomunikasi yang berasal dari Tiongkok yang bernama Huawei. Perusahaan yang telah beroperasi sejak 2001 di Amerika Serikat dan menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat. Kemudian pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang berisi tentang daftar hitam perusahaan bagi pemerintah Amerika Serikat atau *Entity List* dari BIS (Bureau of Industry and Security) milik Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan daftar tersebut berlaku bagi Huawei beserta 40 lebih anak perusahaannya sehingga mewajibkan perusahaan Huawei memiliki lisensi khusus dari pemerintah Amerika Serikat agar dapat berbisnis serta membeli komponen dan perangkat dari perusahaan Amerika Serikat. Kebijakan restriktif tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2019 dan berlaku pada tanggal 16 Mei 2019, kebijakan tersebut ternyata turut mempengaruhi kondisi politik luar negeri yang melibatkan kedua negara yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Terdapat poin besar yang mendasari dikeluarkannya kebijakan restriksi Amerika Serikat terhadap Huawei di era Donald Trump yang didasari oleh adanya persepsi yang berlebihan dan beranggapan bahwa perusahaan Huawei di Amerika

Serikat merupakan ancaman bagi Amerika Serikat pada era Donald Trump, dalam konteks tersebut juga bisa diperkuat dari pendapat Tiezzi<sup>1</sup>, mengenai pemerintah Amerika Serikat sejak beberapa tahun terakhir melihat adanya potensi berupa ancaman dari pengembangan teknologi terbaru dari Huawei, ditambah Huawei mulai mengembangkan teknologi internet 5G yang berpotensi akan mengancam stabilitas nasional negara Amerika Serikat, sehingga pada pemerintahan Trump, Amerika Serikat menerapkan sebuah kebijakan yakni pelarangan operasi Huawei di seluruh negara dikarenakan adanya kekhawatiran yang mengancam keamanan nasional.

Kemudian pihak Huawei dalam beberapa kesempatan tetap pada pendiriannya sekaligus membantah tuduhan-tuduhan ancaman keamanan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat. Perihal tuduhan tersebut, dari sisi Huawei menolak tuduhan-tuduhan tersebut terlebih khusus yang berkaitan dengan pengembangan teknologi terbaru Huawei yang menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat. Jajaran petinggi Huawei angkat bicara mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keputusan yang munafik, bahkan pimpinan Huawei sendiri mengkritik tuduhan korporasi dan pemerintah Tiongkok yang dianggap sebagai mata-mata bagi Tiongkok, sedangkan agen mata-mata Amerika Serikat sendiri tersebar luas di seluruh dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Shannon Tiezzi, *Huawei, China, and Trump's Trade War*, diakses dalam <https://thediplomat.com/2019/05/huawei-china-and-trumps-trade-war/> (23/4/2025 10:06 WIB)

<sup>2</sup> Lecher, C., & Brandom, R. (2019). Is Huawei a Security Threat? Seven Experts Weigh in. *The Verge*, 17.

Perilaku Donald Trump selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat memang terkenal impulsif dan agresif, mengutamakan kepentingan Amerika Serikat, dan berorientasi pada keuntungan pribadi dan politik. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkannya salah satunya yakni kebijakan restriksi Huawei oleh AS, dimana kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Donald Trump dengan berlandaskan persepsi isu keamanan sosial yang akan terganggu menurut Donald Trump, sehingga Donald Trump melarang Huawei berbisnis di AS.

Kebijakan restriksi Huawei oleh AS di era Trump memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap pemerintahan AS. Kebijakan ini meningkatkan fokus pada keamanan nasional terkait teknologi Tiongkok, mendorong perubahan kebijakan dan tindakan legislatif serta eksekutif yang signifikan. Selain itu, risiko yang dihadapi AS pasca kebijakan restriktif terhadap Huawei juga dapat memicu ketidakpastian dalam sektor ekonomi dan politik. Tindakan tersebut dapat memicu tuntutan dari negara-negara lain dan memperburuk kondisi perdagangan global yang sudah tidak stabil. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat AS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti telah merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Amerika Serikat di era Donald Trump mengeluarkan kebijakan restriksi terhadap Huawei ?”**

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi mengkaji dan memberikan penjabaran yang komprehensif terkait dengan kebijakan restriksi AS di era Donald Trump terhadap Huawei.

#### **1.3.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti studi politik mengenai alasan Trump mengeluarkan kebijakan restriksi terhadap Huawei yang berpengaruh terhadap hubungan kedua negara yakni AS dan Cina.

#### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong akademisi dalam menganalisis fenomena politik yang melibatkan persepsi individu terhadap perusahaan besar yang berujung pada ketegangan antar kedua negara dan diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengamat politik dalam menganalisis suatu fenomena.

### **1.4 Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi sekaligus rujukan untuk membuat penelitian ini dikarenakan adanya kesamaan dalam metode maupun teori yang digunakan. Penggunaan penelitian terdahulu digunakan sebagai Literature Review untuk menegaskan orisinalitas dan aspek kebaruan pada penelitian yang dibuat.

Penelitian pertama dalam bentuk Skripsi dari Asrul Lukman Rahmadi yang berjudul ***“ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DONALD TRUMP TERHADAP***

***KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN of ACTION (JCPOA).***” Pada skripsi ini sang penulis menyinggung masalah pengaruh persepsi seorang aktor negara terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkannya.<sup>3</sup> Penulis menggunakan teori persepsi dari pemikiran Ole R. Holsti yakni salah satu dari turunan teori politik luar negeri yang menggunakan pendekatan pada tingkat analisis individu. Terdapat kesamaan topik yang akan dibahas yakni tentang bagaimana pengaruh sikap dan tindakan individu seorang pemimpin negara terhadap kebijakan yang diambil oleh aktor negara tersebut.

Penelitian kedua dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Hafid Adim Pradana yang berjudul ***“Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap China Pada Awal Orde Baru.”*** Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap China pada awal orde baru.<sup>4</sup> Pada penelitian ini penulis menjabarkan tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap China pada awal orde baru di pengaruhi oleh persepsi dari Presiden Suharto sehingga terjadi perubahan kebijakan didalamnya yang berbeda dibanding Presiden sebelumnya. Penelitian ini dijadikan salah satu referensi bagi penulis dikarenakan memiliki persamaan dalam pendekatan analisis yakni teori persepsi yang berkaitan langsung dengan faktor rational choice. Untuk perbedaan tersendiri yakni terdapat pada pembahasan tentang pengaruh Suharto yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri

---

<sup>3</sup> Asrul Lukman Rahmadi, 2023, *ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DONALD TRUMP TERHADAP KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN of ACTION (JCPOA)*, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>4</sup> Hafid Adim. Pradana, *Persepsi Suharto dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina di Era Orde Baru*. Indonesian Perspective, 1(01), 23-42.

Indonesia terhadap China pada awal masa orde baru. Sedangkan penulis akan meneliti mengenai kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump.

Penelitian ketiga dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Jihan Mahligai Aini yang berjudul ***“FAKTOR IDIOSYNCRATIC MA YING-JEOU PADA KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN MELALUI THREE NO’S POLICY.”***

Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin Taiwan yakni Ma Ying-Jeou yakni Three No’s Policy dipengaruhi oleh adanya faktor idiosinkratik dari pemimpin tersebut, yang dimana Ma Ying-Jeou adalah pemimpin yang memiliki individu high need for power atau seseorang yang membutuhkan kekuasaan, dan kepribadian serta persepsi tersebutlah yang melahirkan kebijakan negara yang lebih mengarah pada melakukan kerjasama dibidang ekonomi dibanding memancing konflik antar negara.<sup>5</sup> Persamaan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang adanya pengaruh faktor idiosinkratik presiden dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Akan tetapi penulis lebih berfokus pada pembahasan pilihan rasional dari presiden Donald Trump terhadap kebijakan yang dikeluarkannya terhadap Huawei.

Penelitian keempat dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Walda Okvi Juliana Ningsih yang berjudul ***“Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat.”***

---

<sup>5</sup> Jihan Mahligai. Aini, *FAKTOR IDIOSYNCRATIC MA YING-JEOU PADA KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN MELALUI THREE NO’S POLICY*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 27.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan tentang imigran muslim ini yang dikeluarkan oleh Trump.<sup>6</sup> Beberapa alasan menjadi hal penting yang menyebabkan lahirnya kebijakan ini mulai dari latar belakang pemimpin, karakteristik pemimpin, hingga isu-isu yang berkembang, sehingga hal tersebut melahirkan kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis yakni terdapat dari teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori personalitas pemimpin sedangkan penulis menggunakan teori rational choice.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Lea Florencia Kurnia dengan judul ***“Faktor Idiosinkratik dalam kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap program nuklir Iran.”*** Penelitian ini membahas tentang adanya faktor idiosinkratik yang dimiliki oleh Donald Trump dan berandil besar dalam keluarnya kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan program nuklir Iran.<sup>7</sup> Pada penelitian ini dijelaskan bahwa faktor idiosinkratik ternyata cukup berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkannya mulai dari latar belakang Donald Trump sebagai pebisnis dulunya, yang dimana kebijakan tersebut mengarah kepada keuntungan dan kepentingan Amerika Serikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis yakni dari penggunaan teori serta konsep dan kebijakan yang dibahas. Penelitian sebelumnya menggunakan konsep karakteristik

---

<sup>6</sup> Walda Okvi. Juliana Ningsih, *Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 31.

<sup>7</sup> Lea Florencia. Kurnia, *Faktor Idiosinkratik dalam kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap program nuklir Iran*, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, hal. 6-7.

kepemimpinan oleh Johnson, sedangkan penulis menggunakan teori rational choice dalam menganalisis topik yang akan diangkat.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Asrul Lukman Rahmadi (2023) <i>“ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DONALD TRUMP TERHADAP KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN of ACTION (JCPOA).”</i>	Kualitatif, Teori Persepsi, Fokus pembahasan yakni menganalisis persepsi Donald Trump terhadap JCPOA, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Donald Trump, dan pengaruhnya terhadap kebijakan tersebut	Persepsi yang dimiliki Donald Trump berhasil mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh AS yakni berupa penarikan diri dari kesepakatan JCPOA.
2	Hafid Adim Pradana (2016): <i>“Persepsi Suharto dan Perubahan</i>	Eksplanatif, Teori persepsi, Fokus pembahasan pada	Persepsi yang dihadirkan oleh Presiden Suharto yakni

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
	<i>Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap China Pada Awal Orde Baru“</i>	kebijakan Indonesia pada masa Suharto yang memutuskan hubungan diplomatik Indonesia – China.	menganggap China sebagai ancaman bagi Indonesia dan turut terlibat pada peristiwa 1965. Pembentukan persepsi Suharto dihasilkan oleh adanya sistem keyakinan adat jawa yang dipegang erat oleh Suharto.
3	Jihan Mahligai Aini (2018) : “ <i>FAKTOR IDIOSYNCRATIC MA YING-JEOU PADA KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN MELALUI THREE NO’S POLICY”</i>	Deskriptif, Konsep Idiosinkratik, Fokus penelitian adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Taiwan dibawah pemerintahan Ma Ying-Jeou, khususnya	Beberapa faktor idiosinkratik mempengaruhi kebijakan luar negeri Taiwan dibawah pemerintahan Ma Ying-Jeou dan bagaimana kebijakan Three No’s Policy yang

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
		pada penerapan kebijakan Three No's Policy.	diperuntukkan untuk meningkatkan hubungan Taiwan dengan Cina.
4	Walda Okvi Juliana Ningsih : <i>Personalitas Donald Trump dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelarangan Imigran Muslim ke Amerika Serikat</i>	Eksplanatif Menggunakan Teori personalitas pemimpin Fokus pada personalitas Trump yang akhirnya berbuah sebuah kebijakan terhadap imigran muslim di AS.	Anggapan Trump yakni imigran muslim merupakan persoalan tambahan yang membebani AS. Persepsi yang dimiliki Trump yakni dengan menutup pintu bagi muslim untuk keluar/masuk AS merupakan solusi untuk mengurangi resiko masuknya teroris.
5	Lea Florencia Kurnia (2019) : <i>“Faktor</i>	Kualitatif studi kasus Psikologi politik	Faktor-faktor idiosinkratik

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
	<i>Idiosinkratik dalam kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap program nuklir Iran”</i>	Fokus pada faktor-faktor idiosinkratik Donald Trump yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri AS yakni Program Nuklir Iran	mempengaruhi kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump, terhadap program nuklir Iran. Beberapa faktor tersebut meliputi pandangan politik, kepribadain, pengalaman pribadi, dan kepentingan domestik.

## 1.5 Kerangka Teori dan Konsep Pendekatan

### 1.5.1 Teori Rational Choice

Dalam menganalisa kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump, penulis menggunakan teori Rational Choice atau teori pilihan rasional, teori ini berfokus pada analisis pemikiran sebagai kunci untuk memahami dan memprediksi perilaku sosial dan ekonomi, serta untuk mengembangkan model

yang dapat menjelaskannya.<sup>8</sup> Asumsi fundamental teori pilihan rasional adalah bahwa seluruh fenomena sosial merupakan agregasi dari tindakan-tindakan individual yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan otonom. Teori ini secara metodologis memprioritaskan determinasi pilihan pada level aktor individual (individualisme metodologis).

Asumsi fundamen teori pilihan rasional selanjutnya adalah bahwa setiap aktor individual memiliki struktur preferensi terhadap serangkaian alternatif pilihan yang tersedia, yang memungkinkan mereka untuk mengartikulasikan pilihan yang dikehendaki. Struktur preferensi ini diasumsikan lengkap (aktor selalu dapat menentukan preferensi antar alternatif atau menyatakan indiferensi) dan transitif (jika alternatif A dipreferensikan daripada B, dan B dipreferensikan daripada C, maka A dipreferensikan daripada C). Lebih lanjut, aktor (individu) diasumsikan mempertimbangkan informasi yang relevan, probabilitas kejadian, serta potensi biaya dan manfaat dari setiap alternatif dalam menentukan pilihan. Akhirnya, aktor diasumsikan bertindak secara konsisten dalam memilih tindakan yang diyakini sebagai yang terbaik menurut perspektif subjektif mereka, yang akan bermuara pada pengambilan keputusan.

Konsep teori pilihan rasional, sebagaimana dielaborasi oleh Duncan Snidal dalam karyanya "Rational Choice Theory and International Relations," menjelaskan bahwa terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan merupakan hasil

---

<sup>8</sup> Durlauf, S., & Blume, L. E. (2008). *The new Palgrave dictionary of economics*. L. Blume (Ed.). Palgram Macmillan.

dari pertimbangan fakta dan informasi yang relevan oleh aktor individual dalam proses formulasi kebijakan luar negeri.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, pandangan yang komparatif dikemukakan oleh Stephen M. Walt dalam publikasinya "Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies," yang mengartikulasikan bahwa teori pilihan rasional memiliki karakter individualistik, yang mengimplikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh aktor unitaris, atau individu, berpotensi menghasilkan konsekuensi kolektif dalam ranah sosial dan politik. Walt juga menegaskan asumsi sentral teori ini, yaitu bahwa setiap aktor, termasuk entitas individual, akan berupaya mengoptimalkan kapasitas analitis mereka dalam mengevaluasi serangkaian pilihan yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi alternatif yang memberikan keuntungan maksimal bagi entitas negara yang diwakilinya.<sup>10</sup>

Dalam kerangka teori pilihan rasional, terdapat serangkaian tahapan yang krusial sebelum aktor individual mengambil keputusan yang berdampak pada negara. Mengacu pada pandangan Kegley, pilihan rasional dipahami sebagai suatu proses formulasi kebijakan yang melibatkan prosedur pengambilan keputusan yang terstruktur. Prosedur ini dipandu oleh pendefinisian situasi secara cermat, penimbangan tujuan-tujuan yang relevan, pertimbangan komprehensif terhadap seluruh alternatif tindakan yang mungkin, hingga pemilihan opsi yang dianggap paling menguntungkan dan memiliki probabilitas tertinggi untuk mencapai tujuan-

---

<sup>9</sup> Duncan Snidal, "Rational Choices and International Relations", Sage Publication, (2012), hal 87

<sup>10</sup> Stephen M Waltz, "Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies", International Security, Vol 23, No.4, (1999). Hal 10-11

tujuan strategis yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Dalam mengambil sebuah keputusan maka seorang pemimpin harus memperhatikan empat proses penting ini yakni *Problem Recognition and Definition, Goal Selection, Identification of Alternatives,* dan *Choice.*<sup>12</sup>

### 1. *Problem Recognition and Definition*

Pada tahapan awal ini, para pembuat keputusan dihadapkan pada imperatif untuk mengidentifikasi secara akurat permasalahan eksternal yang relevan dan selanjutnya melakukan distingsi karakteristik secara objektif. Objektivitas dalam konteks ini mengimplikasikan pengumpulan informasi yang komprehensif mengenai isu, tindakan, pergerakan, serta kapabilitas aktor-aktor eksternal, dengan tujuan memastikan bahwa informasi yang terkumpul secara menyeluruh koheren dengan realitas faktual permasalahan yang dihadapi.

### 2. *Goal Selection*

Seorang pembuat keputusan memiliki imperatif untuk mengetahui dan mendefinisikan secara presisi tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan. Tahapan ini juga meniscayakan identifikasi dan hierarkisasi nilai-nilai yang dianggap prioritas, seperti keamanan nasional atau kesejahteraan ekonomi. Proses ini esensial dalam merumuskan strategi yang tepat guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Charles W. Kegley and Eugene R. Witkoff, 2009, *World Politics: Trend and Transformation* (ed. 12), Belmont: Wadsworth Publishing, hal. 196.

<sup>12</sup> *Ibid.*

### 3. *Identification of Alternatives*

Setelah melalui kedua proses diatas, maka proses selanjutnya yang harus diperhatikan oleh *decision maker* adalah pendefinisian atau pengidentifikasian beberapa pilihan alternatif didalamnya sehingga dibutuhkan data-data secara menyeluruh yang dirancang guna melibatkan determinasi serangkaian alternatif atau opsi kebijakan yang potensial untuk diimplementasikan. Proses ini mensyaratkan evaluasi yang saksama terhadap aspek biaya dan manfaat (Cost and Benefit) yang melekat pada setiap opsi kebijakan yang dipertimbangkan.

### 4. *Choice*

Proses yang terakhir adalah rasionalitas atau sebuah pilihan yang akan diambil, setelah mempertimbangkan beberapa aspek penting sebelumnya maka akan mengarah pada memilih satu pilihan tunggal yang memiliki kemungkinan terbesar dalam keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemilihan satu kebijakan ditetapkan yang dilakukan oleh *decision makers* harus didukung dengan prediksi yang akurat atas keberhasilan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, apabila seorang *decision makers* telah sampai kepada proses ini, maka kebijakan yang dihasilkan oleh *decision maker* tersebut telah dinyatakan sebagai kebijakan yang bersifat rasional karena telah mempertimbangkan dengan tepat aspek keuntungan dan kerugian di dalamnya.

Dalam studi ini, penulis berargumen bahwa aplikasi teori pilihan rasional merupakan pendekatan yang relevan untuk menganalisis kebijakan restriksi terhadap Huawei oleh Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa pilihan kebijakan yang diambil oleh

Trump merepresentasikan pilihan rasional yang ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan nasional AS. Lebih lanjut, persepsi Trump terhadap potensi Huawei sebagai ancaman signifikan terhadap stabilitas dan kepentingan Amerika Serikat menjadi landasan bagi pandangan ini. Dengan demikian, teori pilihan rasional dipandang sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengeksplorasi rasionalitas atau persepsi Donald Trump secara mendalam dalam konteks pengambilan kebijakan restriksi terhadap Huawei.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis eksplanatif untuk menjelaskan kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump. Pendekatan penelitian ini menggunakan level analisis individu (*individual-level analysis*). Pada level analisis ini berfokus pada menganalisa seorang individu sebagai aktor dalam pengambil keputusan negara, dan selera pribadi dari Donald Trump dalam pengambilan keputusan yang menjadi fokus penelitian.

### **1.6.2 Variabel Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya adalah kebijakan restriksi Amerika Serikat terhadap Huawei, sedangkan variabel independennya yakni persepsi Donald Trump. Dimana dalam topik penelitian ini, variabel independen akan mempengaruhi variabel dependennya.

### **1.6.3 Level Analisa**

Level Analisa digunakan untuk menjelaskan level dari unit analisa dan unit eksplanasi pada topik yang akan diteliti. Pada proses identifikasi level analisa di dalamnya, maka perlu memperhatikan dalam menentukan unit analisa, yaitu unit yang fenomenanya hendak diteliti, dijelaskan, hingga melahirkan sebuah hipotesa di dalamnya, kemudian untuk unit eksplanasi, yakni sebuah dampak terhadap unit analisa yang hendak diteliti oleh penulis.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan level analisa yang bersifat reduksionis, yaitu level unit analisa yang digunakan lebih tinggi dari level unit eksplanasi.

### **1.6.4 Teknik Analisa Data**

Dalam meneliti kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump, penulis menggunakan teknik analisa data deduktif. Dengan menggunakan teknik analisa data deduktif, penulis akan mengacu pada data-data yang bersifat umum kemudian akan diambil kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

### **1.6.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni dokumentasi yang bersumber pada Jurnal-jurnal, buku, skripsi, artikel, website dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik, tema, dan judul penelitian.

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, 1990, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, halaman 40.

## **I.6.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **I.6.6.1 Batasan Materi**

Batasan materi ditujukan agar penelitian fokus dalam membahas suatu fenomena dan menghindari pembahasan yang diluar konteks. Dalam penelitian ini, penulis membatasi aktor yang terlibat dalam permasalahan yakni Donald Trump dan kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat yang menjadi fokus kajian adalah kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump. Penelitian ini akan mencoba menganalisa mengapa Amerika Serikat di era Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut dengan ditinjau dari karakter pribadinya dan persepsi Trump dalam pengambilan keputusan.

### **I.6.6.2 Batasan Waktu**

Dalam penelitian ini batasan waktu yang digunakan oleh penulis adalah mulai dari era Donald Trump yang dimana keluarkannya kebijakan tersebut yakni pada tahun 2019 hingga berakhirnya masa jabatan Donald Trump di tahun 2021.

## **1.7 Hipotesa**

Rasionalitas yang dimiliki Presiden Donald Trump menghasilkan sebuah kebijakan restriktif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan Huawei, langkah tersebut dinilai mengandung pro dan kontra didalamnya yang akan berakibat pada terganggunya pola hubungan antar kedua negara. Kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi negara AS yang akan berdampak pada stabilitas politik luar negeri kedua negara besar yakni Amerika Serikat dan Cina.

Dalam perspektif teori pilihan rasional, sebagaimana dikemukakan oleh Charles W. Kegley, rasionalitas seorang pembuat kebijakan (Decision Maker) dapat dievaluasi berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses formulasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengenalan dan definisi masalah (Problem Recognition and Definition), pemilihan tujuan (Goal Selection), identifikasi alternatif-alternatif kebijakan (Identification of Alternatives), dan pemilihan opsi (Choice). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, urutan tahapan pembuatan kebijakan ini dijadikan sebagai alur metodologis yang sistematis dan harus terpenuhi agar kebijakan yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang rasional bagi kepentingan negara yang bersangkutan.

Rasionalitas kebijakan yang diambil oleh Donald Trump dapat dijelaskan melalui penerapan tahapan-tahapan rasionalitas yang diuraikan oleh Kegley. Tahapan-tahapan tersebut diimplementasikan sebagai berikut: Identifikasi dan pemahaman komprehensif terhadap kerjasama dengan Huawei (*Problem Recognition and Definition*), penetapan tujuan kebijakan yang berorientasi pada keuntungan nasional (*Goal Selection*), analisis sistematis terhadap peluang-peluang yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan (*Identification of Alternatives*), dan pengambilan keputusan strategis untuk memberlakukan kebijakan restriksi terhadap Huawei (*Choice*).

Penulis beragumen bahwa kebijakan restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump adalah sebuah contoh bagaimana seorang pemimpin negara atau individu sangat berperan penting dalam menentukan pilihan rasionalnya terhadap keuntungan maupun kerugian bagi negaranya, dengan

mempertimbangkan beberapa tahapan yang harus ditempuh hingga sampai pada proses akhir dari pengambilan keputusan tersebut, maka kebijakan tersebut dinilai merupakan pilihan yang rasional atau berasal dari persepsi Donald Trump pada Huawei berupa adanya ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat dan persepsi tersebut berfokus pada kepentingan negara Amerika Serikat. Ditambah dengan pengalaman sebagai pebisnis yang handal, hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan rasional yang diambil dengan kalkulasi yang tepat untuk kedepannya.



## **I.8 Sistematika Penulisan**

Untuk membantu pembaca dalam memahami substansi penelitian ini, maka penulis menyediakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	<b>1.1</b> Latar Belakang Masalah <b>1.2</b> Rumusan Masalah <b>1.3</b> Tujuan dan Manfaat Penelitian <b>1.3.1</b> Manfaat Akademis <b>1.3.2</b> Manfaat Praktis <b>1.4</b> Penelitian Terdahulu <b>1.5</b> Kerangka Teoritis <b>1.5.1</b> Teori Rational Choice <b>1.6</b> Metodologi Penelitian <b>1.6.1</b> Jenis dan Pendekatan Penelitian <b>1.6.2</b> Variabel Penelitian <b>1.6.3</b> Level Analisa <b>1.6.4</b> Teknik Analisa Data <b>1.6.5</b> Metode Pengumpulan Data <b>1.6.6</b> Ruang Lingkup Penelitian <b>1.6.6.1</b> Batasan Materi <b>1.6.6.2</b> Batasan Waktu <b>1.7</b> Argumen Pokok <b>1.8</b> Sistematika Penulisan
------------------------------------	---

<p><b>BAB II</b></p> <p><b>Pandangan Amerika Serikat pada Huawei</b></p>	<p><b>2.1</b> Huawei dalam Perspektif Amerika Serikat</p> <p><b>2.1.1</b> Sejarah Huawei dan Keterlibatan Pemerintah Tiongkok dengan Huawei</p> <p><b>2.1.2</b> Ekspansi Huawei di Amerika Serikat dan Propaganda AS terhadap Huawei</p> <p><b>2.2</b> Kebijakan Restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump</p>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>Analisa Kebijakan Restriksi Huawei oleh Amerika Serikat di era Donald Trump</b></p>	<p><b>3.1</b> Identifikasi Masalah pada Kebijakan Restriksi Huawei</p> <p><b>3.2</b> Pemetaan Opsi Kebijakan</p> <p><b>3.3</b> Analisis Biaya-Manfaat</p> <p><b>3.4</b> Pemilihan Kebijakan Optimal oleh Donald Trump</p>
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>Penutup</b></p>	<p><b>4.1</b> Kesimpulan</p> <p><b>4.2</b> Saran</p>
<p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p>	